POHON KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

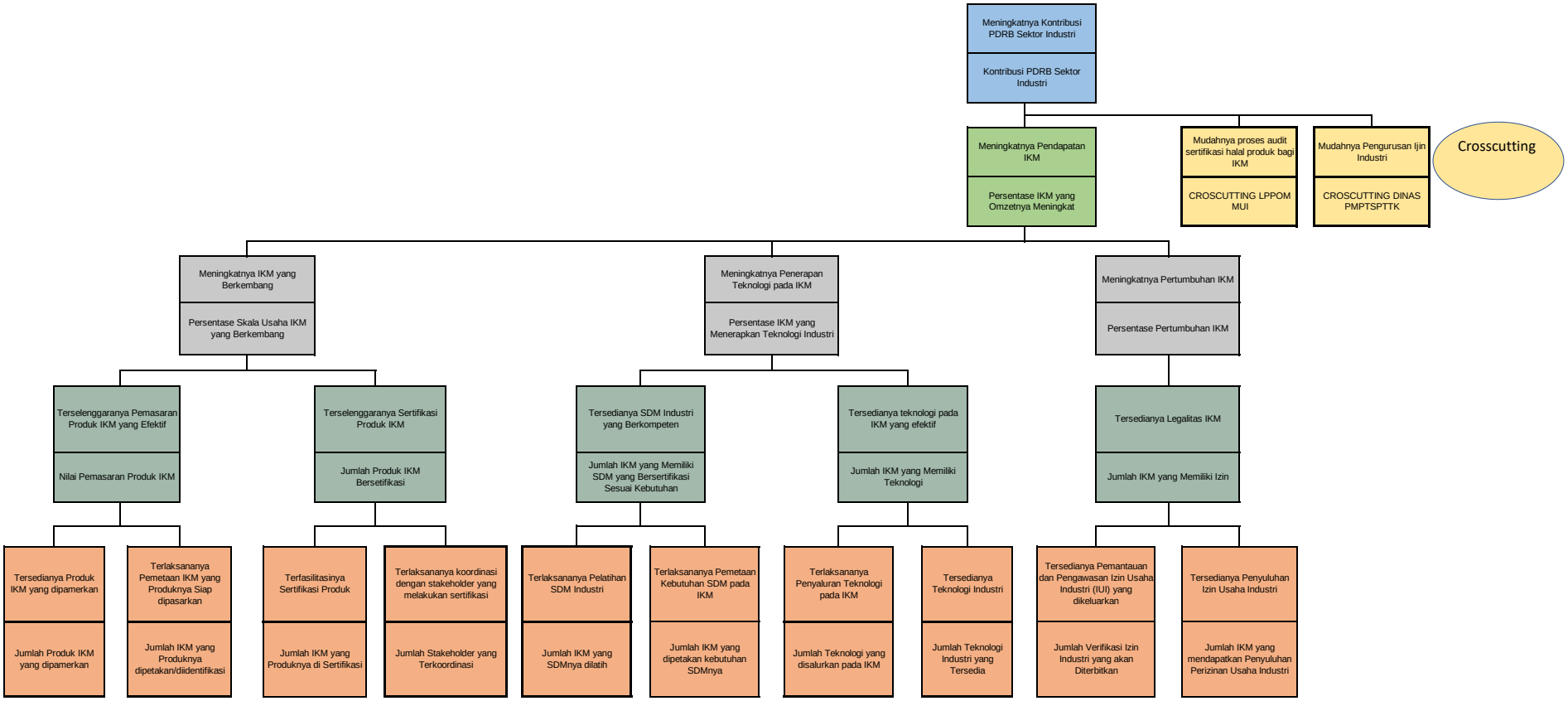

CASCADING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN SKPD

SASARAN SKPD

SASARAN PROGRAM

SASARAN KEGIATAN

SASARAN SUB KEG

TUJUAN SKPD

PK /SKP JPT

PK /SKP KABID

PK /SKP JF

PK /SKP JF/JP

Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri

Kontribusi PDRB Sektor Industri

Crosscutting

Mudahnya proses audit sertifikasi halal produk bagi IKM

CROSCUTTING LPPOM MUI

Mudahnya Pengurusan Ijin Industri

CROSCUTTING DINAS PMPTSPTTK

Meningkatnya Pendapatan IKM

Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat

Meningkatnya IKM yang Berkembang

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang

Terselenggaranya Pemasaran Produk IKM yang Efektif

Terselenggaranya Sertifikasi Produk IKM

Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Nilai Pemasaran Produk IKM

Jumlah Produk IKM Bersertifikasi

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

Tersedianya Produk IKM yang dipamerkan

Terlaksananya Pemetaan IKM yang Produknya Siap dipasarkan

Terdiseminasi dan Terpublikasikannya DataInformasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS

Jumlah Produk IKM yang dipamerkan

Jumlah IKM yang Produknya dipetakan/diidentifikasi

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terfasilitasinya Sertifikasi Produk

Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder yang melakukan sertifikasi

Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Jumlah IKM yang Produknya di Sertifikasi

Jumlah Stakeholder yang Terkoordinasi

Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri

Tersedianya SDM Industri yang Berkompeten

Tersedianya teknologi pada IKM yang efektif

Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota

Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan

Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terlaksananya Pelatihan SDM Industri

Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan SDM pada IKM

Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah IKM yang SDMnya dilatih

Jumlah IKM yang dipetakan kebutuhan SDMnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Terlaksananya Penyaluran Teknologi pada IKM

Tersedianya Teknologi Industri

Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Jumlah Teknologi yang disalurkan pada IKM

Jumlah Teknologi Industri yang Tersedia

Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi

Meningkatnya Pertumbuhan IKM

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Persentase Pertumbuhan IKM

Tersedianya Legalitas IKM

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Jumlah IKM yang Memiliki Izin

Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Tersedianya Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan

Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Jumlah Verifikasi Izin Industri yang akan Diterbitkan

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Penyuluhan Izin Usaha Industri

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Jumlah IKM yang mendapatkan Penyuluhan Perizinan Usaha Industri

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat